



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS JEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SLAMIN DRS M COM SC PHD**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK**
3. NHK : **96792**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.010.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 229 m2/200 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. Tanah Seluas 229 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
3. Tanah Seluas 470 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
4. Tanah Seluas 993 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
5. Tanah Seluas 1.552 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
6. Tanah Seluas 1.790 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
7. Tanah Seluas 1.890 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **270.080.000**

1. LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 80.000
2. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000



3. MOBIL, HONDA STREAM Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
5. LAINNYA, POLYGON SEPEDA/HEIST X2 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
6. MOTOR, HONDA VARIO 160 Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	97.255.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	600.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	799.440.339
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.776.775.339

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.776.775.339

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.